

Good Governance di Era Digital: Pemerintah Kabupaten Sumedang Sebagai Model Transformasi Pelayanan Publik



Author:

Rozalia Wardana^{1*}, Kurnia Asyahari Meilya², Khairatul Fatati³

Affiliation:

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jl.
Prabu Geusan Ulum No. 36, Sumedang, Jawa Barat,
Indonesia¹

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20,
Jatinangor 45363, Indonesia^{2,3}

e-Mail: rozaliawardana@gmail.com¹,
kurniaasyaharimeilyaputri@gmail.com², khairatul1809@gmail.com³

*Correspondence Author

Received, 24 Desember 2024

Revised, 30 September 2025

Accepted, 13 Oktober 2025

Available Online, 20 Oktober 2025

Abstrak

Digitalisasi tata kelola pemerintahan menjadi strategi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat lokal. Kabupaten Sumedang dipilih sebagai studi kasus karena dianggap pionir dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui inovasi seperti I-OPIS Desa, layanan WhatsApp, dan program Sumedang *Connected*. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi pelayanan publik di Sumedang serta tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan SPBE, serta observasi non-partisipan terhadap penggunaan layanan digital, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memperkuat efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, tetapi masih menghadapi kendala berupa ego sektoral, kesenjangan digital, literasi teknologi, dan isu keamanan data. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan digital *Governance* tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga regulasi, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai tata kelola digital di tingkat daerah serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan pelayanan publik berbasis teknologi di Indonesia.

Kata Kunci: Tata kelola pemerintahan yang baik, *digital governance*, *e-government*, Sumedang.

Abstract

The digitalization of public Governance has become a key strategy in realizing good governance at the local level. Sumedang Regency was selected as a case study because it is recognized as a pioneer in implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) through innovations such as I-OPIS Desa, WhatsApp-based services, and the Sumedang Connected program. This study aims to analyze the implementation of digital public service transformation in Sumedang and to identify the challenges it faces. This research employed a qualitative case study approach. Data were collected from policy documents, SPBE reports, and non-participant observations of digital service utilization, and analyzed using thematic

analysis. The findings reveal that digitalization strengthens efficiency, transparency, accountability, and citizen participation, yet challenges persist in the form of sectoral ego, the digital divide, limited digital literacy, and data security issues. The study emphasizes that the success of digital Governance is not solely determined by technology, but also by regulations, leadership, and cross-sector collaboration. This research contributes to the literature on local digital Governance and offers practical implications for enhancing technology-based public services in Indonesia.

Keywords: *Good Governance, Digital Governance, E-Government, Sumedang.*

1. Pendahuluan

Perkembangan pesat era digital telah menempatkan urgensi baru pada implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik. Prinsip-prinsip fundamental *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas, kini tidak lagi memadai jika hanya dijalankan secara konvensional. Sebaliknya, optimalisasi prinsip-prinsip tersebut secara signifikan memerlukan dukungan dan integrasi teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan transformasi pelayanan publik menjadi lebih efisien, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Supratiwi et al., 2019). Oleh karena itu, adopsi teknologi digital bukan hanya menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis bagi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di era kontemporer.

Di Indonesia, program reformasi birokrasi telah memasuki fase terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, dengan salah satu tujuan utamanya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mampu memberikan pelayanan publik berkualitas (Athallah, 2022). Dalam implementasi *electronic government* (*e-government*) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi strategi nasional untuk mendorong efisiensi dan keterbukaan di tingkat pusat maupun daerah. Namun, adopsi digital governance di tingkat lokal masih menghadapi variasi yang besar, baik dari sisi kesiapan infrastruktur, kapasitas aparatur, maupun partisipasi masyarakat (Sunardi et al., 2022).

Keterbukaan informasi di seluruh badan publik merupakan pilar fundamental bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Setiap organisasi

pemerintahan wajib menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan akses informasi secara terbuka, sekaligus memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka (Pramesti & Mardhatillah, 2023). Oleh karena itu, pemerintah harus secara konsisten mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi. Langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik dan mendorong kolaborasi yang konstruktif.

Kabupaten Sumedang merepresentasikan salah satu contoh penting dalam praktik transformasi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip *Good governance* di daerah ini tidak hanya menunjukkan upaya perbaikan tata kelola, tetapi juga menawarkan model empiris yang relevan untuk ditelaah lebih lanjut. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Susanto Machmud et al., 2023).

Upaya digitalisasi di Sumedang tercermin melalui penerapan SPBE yang mengintegrasikan layanan publik dengan basis data kependudukan dan infrastruktur komunikasi daring. Inovasi ini mencakup layanan berbasis WhatsApp dan perluasan akses internet desa melalui program Sumedang *Connected*. Inovasi ini memperlihatkan upaya untuk mewujudkan *Good governance* di tingkat lokal. Namun demikian, praktik tersebut juga dihadapkan pada tantangan serius, seperti ego sektoral antarinstansi, kesenjangan digital, literasi teknologi masyarakat, serta isu keamanan data faktor yang masih jarang dikaji secara komprehensif dalam literatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia.

Untuk menjamin bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan secara efisien dan efektif, maka penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam pengelolaan TIK sangat diperlukan, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah Tata Kelola TIK (Wahyudi et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good governance* dalam Tata Kelola TIK menjadi kunci utama agar penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumedang mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good governance* melalui transformasi digital, serta mengidentifikasi

dampak dan tantangan yang muncul dari proses implementasi tersebut. Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi praktik digital governance di Kabupaten Sumedang, menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta mengkaji berbagai kendala yang perlu diatasi agar model tata kelola digital tersebut dapat direplikasi secara efektif oleh daerah lain.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan mengevaluasi keberhasilan sekaligus hambatan dalam implementasi *Good governance* berbasis digital pada tingkat lokal. Analisis tidak hanya menekankan pada capaian efisiensi pelayanan publik, tetapi juga mengkaji faktor-faktor penghambat yang sering terabaikan dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai digital *governance* sekaligus menawarkan rekomendasi praktis yang relevan bagi pemerintah daerah lain di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada implementasi digital *Governance* di Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alami, sebagaimana ditegaskan oleh Creswell (2014). Data penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen kebijakan daerah, seperti Peraturan Bupati, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *website* resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang, serta aplikasi digital yang dikembangkan, seperti I-OPIS Desa, Aplikasi Tahu Sumedang, dan layanan WhatsApp. Selain itu, berita daring, laporan tahunan, dan publikasi ilmiah yang relevan turut dijadikan rujukan.

Data primer dikumpulkan melalui observasi non-partisipan terhadap penggunaan aplikasi digital, khususnya I-OPIS Desa dan layanan WhatsApp untuk administrasi kependudukan. Observasi dilakukan sepanjang tahun 2023 di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta di sejumlah desa

di Kabupaten Sumedang. Catatan lapangan meliputi interaksi masyarakat dengan layanan digital, alur penggunaan aplikasi, serta respons aparaturnya dalam memberikan pelayanan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik sebagaimana dikemukakan oleh Braun & Clarke (2006). Proses analisis mencakup enam tahap, yaitu membaca data secara menyeluruh, memberi kode awal, mengidentifikasi tema utama (misalnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi), meninjau ulang tema agar sesuai dengan data, mendefinisikan dan menamai tema, serta menyusun laporan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengekstraksi makna dari data yang beragam serta menghubungkannya dengan kerangka teoritis yang telah dibangun.

Pertimbangan etis juga diperhatikan dalam penelitian ini. Meskipun tidak melibatkan wawancara langsung dengan informan, observasi non-partisipan dilakukan tanpa merekam identitas pribadi masyarakat, dan data yang digunakan hanya berupa aktivitas umum pada layanan publik digital. Selain itu, seluruh dokumen resmi diakses melalui sumber terbuka sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3. Hasil Dan Pembahasan

Inovasi Teknologi dan Layanan Digital

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menempatkan digital governance sebagai fondasi utama dalam transformasi pelayanan publiknya. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka kerja yang membangun ekosistem digital terpadu, berlandaskan prinsip Satu Data Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basisnya. Beberapa inovasi kunci yang telah diterapkan meliputi:

- 1) Aplikasi I-OPIS Desa: Inovasi ini memungkinkan penerbitan surat keterangan yang sebelumnya membutuhkan waktu sehari-hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Kecepatan layanan ini secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi di tingkat desa.

- 2) Layanan Berbasis WhatsApp: Mengadopsi aplikasi komunikasi populer di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyediakan layanan berbasis WhatsApp. Melalui platform ini, dokumen administrasi dapat dikirimkan dalam format PDF langsung ke perangkat warga, mempermudah akses dan mengurangi kebutuhan tatap muka.
- 3) Command Center: Pemerintah juga membangun Command Center sebagai pusat pengelolaan data dan pengendalian informasi publik. Fasilitas ini berperan vital dalam mengintegrasikan berbagai data dan memastikan informasi yang akurat dan terkini tersedia bagi pengambilan keputusan.
- 4) I-OPIS ASN: Untuk pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dikembangkan aplikasi I-OPIS ASN yang mencakup manajemen kinerja, absensi, laporan harian, hingga penilaian talenta. Ini menunjukkan upaya digitalisasi tidak hanya pada pelayanan publik eksternal, tetapi juga internal birokrasi.

Inovasi-inovasi digital ini secara kolektif memperlihatkan peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, minimnya interaksi tatap muka juga berpotensi meminimalisir praktik maladministrasi. Temuan ini selaras dengan penelitian Aswar et al. (2023) yang menegaskan bahwa kualitas sistem digital memiliki korelasi positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kerangka e-government, model yang diterapkan Sumedang menunjukkan bahwa keberhasilan tidak semata pada kecanggihan teknologi, melainkan pada kesesuaian dengan kebutuhan warga.

Transparansi dan Akuntabilitas

Transformasi digital di Kabupaten Sumedang juga secara signifikan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) memperkuat akuntabilitas dalam proses administrasi. Perangkat desa kini dapat menandatangani dokumen tanpa harus hadir secara fisik di kantor, sementara validitas dan keabsahan tanda tangan dijamin melalui kerja sama dengan Badan Sertifikasi Elektronik (BSRE). Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan integritas dokumen.

Integrasi TTE dengan sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) memungkinkan konsistensi data dan mengurangi redundansi, yang selama ini

menjadi salah satu kelemahan dalam pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan basis data tunggal, proses audit lintas instansi dapat dilakukan secara lebih sistematis, sehingga mendorong keterbukaan informasi pemerintah kepada publik. Hal ini sejalan dengan prinsip *Good governance* yang menekankan transparansi dan akuntabilitas (Basri et al., 2021).

Dari sisi regulasi, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan sejumlah Peraturan Bupati yang secara eksplisit mendorong keterbukaan data dan mewajibkan berbagi informasi antarinstansi. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian integral dari *good governance*.

Partisipasi Publik

Pemerintah Kabupaten Sumedang juga berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan melalui inisiatif digital. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumedang meluncurkan Program Sumedang *Connected*. Program ini bertujuan memperluas akses internet hingga ke 270 desa di Kabupaten Sumedang. Dengan infrastruktur internet yang memadai, masyarakat tidak hanya lebih mudah mengakses layanan publik digital, tetapi juga memiliki platform untuk memberikan masukan dan umpan balik terhadap kebijakan publik.

Partisipasi publik juga didorong melalui penggunaan media sosial resmi pemerintah sebagai saluran komunikasi dua arah. Platform ini memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan warga, memfasilitasi penyampaian informasi dan penyerapan aspirasi. Peningkatan akses internet melalui Sumedang *Connected* menjadi katalis bagi meningkatnya *e-participation*. Hal ini sejalan dengan argumen Sivarajah et al. (2016) bahwa partisipasi digital dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik. Namun, keberhasilan partisipasi publik di Sumedang sangat bergantung pada program literasi digital yang inklusif, mengingat potensi kesenjangan digital yang dapat membatasi keterlibatan merata antar kelompok masyarakat.

Tantangan Implementasi Digital Governance

Meskipun telah menunjukkan kemajuan signifikan, implementasi digital governance di Kabupaten Sumedang masih menghadapi beberapa tantangan struktural dan kultural yang perlu diatasi. Beberapa tantangan signifikan masih dihadapi. Tantangan utama adalah adanya ego sektoral antarinstansi yang menyebabkan keterlambatan dalam integrasi data. Beberapa dinas masih menunjukkan keengganan untuk berbagi informasi, menghambat terwujudnya sistem yang terpadu dan holistik. Fenomena ini mencerminkan masalah klasik dalam birokrasi, yaitu fragmentasi kewenangan yang menghambat koordinasi (Najich Alfayn, 2022).

Kedua, kesenjangan digital (*Digital Divide*) masih menjadi realitas, terutama di wilayah pedesaan dengan akses internet yang terbatas. Meskipun program Sumedang *Connected* berupaya mengatasinya, disparitas akses dan infrastruktur masih menjadi kendala bagi pemerataan layanan digital. Ketiga, tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata menghambat optimalisasi pemanfaatan layanan digital. Banyak warga yang masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi atau platform digital, sehingga mengurangi efektivitas inovasi yang telah dikembangkan. Studi menunjukkan bahwa literasi digital rendah di daerah pedesaan Indonesia sering menjadi penghalang utama partisipasi inklusif.

Keempat, Terdapat risiko keamanan data yang belum teratasi secara komprehensif. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terkait perlindungan privasi data pribadi mereka. Menurut Purnamasari et al. (2023), keberhasilan *e-government* sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, yang hanya bisa dipertahankan jika ada jaminan perlindungan data pribadi. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap sistem digital dapat tergerus.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa transformasi digital Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, tantangan yang ada menunjukkan bahwa model ini masih dalam tahap transisi dan memerlukan upaya berkelanjutan dalam aspek regulasi, kepemimpinan, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Sebagai *best practice*, Sumedang memberikan pelajaran bahwa

keberhasilan digital governance tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi juga oleh faktor-faktor non-teknis yang penting.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa transformasi digital Pemkab Sumedang telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi sekaligus menegaskan adanya tantangan struktural dan kultural yang perlu diatasi.

Inovasi Teknologi: Efisiensi dan Responsivitas

Adopsi I-OPIS Desa dan layanan WhatsApp memperlihatkan bagaimana teknologi sederhana sekalipun dapat mendorong efisiensi layanan publik. Hal ini sesuai dengan temuan Ibrahim et al. (2023) yang menunjukkan bahwa inovasi digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam kerangka *e-government*, model ini memperlihatkan bahwa kunci keberhasilan bukan semata pada kecanggihan teknologi, tetapi pada kesesuaian dengan kebutuhan warga.

Transparansi dan Akuntabilitas: Tantangan Integrasi Data

Implementasi TTE dan sistem berbasis NIK menunjukkan langkah maju dalam transparansi administrasi. Namun, ego sektoral antarinstansi menghambat integrasi penuh data. Fenomena ini mencerminkan masalah klasik dalam birokrasi, yaitu fragmentasi kewenangan yang menghambat koordinasi (Najich Alfayn, 2022). Literatur *Governance* menegaskan bahwa tanpa regulasi kuat dan kepemimpinan yang berkomitmen, digitalisasi cenderung hanya menghasilkan sistem parsial (Basri et al., 2021).

Partisipasi Publik: Antara Potensi dan Kesenjangan

Melalui Sumedang *Connected*, akses internet menjadi katalis bagi meningkatnya e-participation. Hal ini sejalan dengan argumen Sivarajah et al. (2016) bahwa partisipasi digital memperkuat legitimasi kebijakan publik. Namun, kesenjangan digital membatasi keterlibatan merata antar kelompok masyarakat. Studi menunjukkan bahwa literasi digital rendah di daerah pedesaan Indonesia sering menjadi penghalang utama partisipasi inklusif. Dengan demikian,

keberhasilan partisipasi publik di Sumedang sangat bergantung pada program literasi digital yang inklusif.

Regulasi dan Keamanan Data: Kunci Keberlanjutan

Peraturan Bupati mengenai SPBE dan TTE menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi resistensi birokrasi. Akan tetapi, isu keamanan data masih menjadi tantangan utama. Menurut Purnamasari et al. (2023), keberhasilan *e-government* sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, yang hanya bisa dipertahankan jika ada jaminan perlindungan data pribadi. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap sistem digital dapat tergerus.

Model Sumedang sebagai Praktik Baik

Sumedang telah memenuhi sebagian besar prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun, tantangan kesenjangan digital, ego sektoral, dan keamanan data menunjukkan bahwa model ini masih dalam tahap transisi. Sebagai *best practice*, Sumedang memberi pelajaran bahwa keberhasilan digital *Governance* tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi juga oleh kepemimpinan, regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta kesiapan masyarakat.

Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) memerlukan sistem yang efisien dan terintegrasi untuk mendukung kelancaran administrasi serta peningkatan kinerja pegawai. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) hadir sebagai solusi teknologi yang mengoptimalkan proses tersebut. Dengan menggunakan SIASN, berbagai kebutuhan administrasi ASN dapat dikelola dengan lebih cepat dan tepat, mulai dari penerimaan berkas, pengumpulan data, hingga pengarsipan dan pengiriman dokumen. Hal ini berdampak langsung pada penurunan waktu proses yang signifikan, sehingga aktivitas administrasi menjadi lebih efisien (Hazira, 2024).

Penelitian yang dilakukan di Command Center Sumedang menunjukkan bahwa penerapan SIASN tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan sistem yang terkomputerisasi, pegawai dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, tanpa harus terbebani oleh proses administratif yang rumit. Perbaikan efisiensi ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan responsif terhadap kebutuhan internal maupun eksternal.

Selain mengoptimalkan administrasi, SIASN juga mendukung pengelolaan data ASN secara transparan dan akuntabel. Semua data pegawai dapat diakses secara digital dengan tingkat keamanan yang terjamin, sehingga memudahkan pengawasan dan pengelolaan informasi. Hal ini penting dalam menjaga integritas data serta meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi informasi yang dapat merugikan sistem secara keseluruhan.

Pengembangan sistem digital tidak berhenti pada SIASN saja. Dalam bidang manajemen kinerja ASN, pengembangan aplikasi seperti SASIKAP EVO 6.0 telah membawa perubahan signifikan. Aplikasi ini mendukung penilaian kinerja ASN secara real-time, sehingga setiap pelaporan dan evaluasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat (Indrayani, 2023). Real-time monitoring ini memungkinkan pimpinan dan pegawai untuk selalu mengikuti perkembangan kinerja secara transparan.

Penggunaan SASIKAP EVO 6.0 juga memudahkan integrasi data dari berbagai unit kerja, menciptakan kesatuan informasi yang terpadu. Dengan demikian, pemantauan kinerja tidak lagi bergantung pada dokumen manual yang rentan hilang atau terlambat, melainkan melalui sistem digital yang terpusat dan sistematis. Ini mempercepat pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan berbasis data yang valid. Salah satu keunggulan yang paling mencolok dari penerapan aplikasi digital dalam manajemen kinerja adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses penilaian dapat dilacak secara jelas, sementara pegawai juga memiliki akses untuk melihat dan memahami hasil evaluasi kinerja mereka. Transparansi ini mendorong budaya kerja yang lebih jujur dan profesional, karena semua proses berjalan terbuka dan objektif.

Kemudahan dalam penyusunan laporan kinerja juga menjadi nilai tambah dari penggunaan SASIKAP EVO 6.0. Dengan fitur pelaporan otomatis dan terstruktur, pegawai dapat mengurangi beban kerja administratif sekaligus meningkatkan akurasi data yang disampaikan. Laporan yang dihasilkan menjadi lebih cepat tersedia dan siap untuk dianalisis sebagai bahan evaluasi atau perencanaan pengembangan SDM.

Penerapan kedua sistem ini, SIASN dan SASIKAP EVO 6.0, jika digabungkan, dapat memberikan dampak sinergis yang sangat positif bagi organisasi pemerintahan. Pengelolaan ASN yang efektif dan penilaian kinerja yang transparan akan meningkatkan produktivitas dan motivasi pegawai. Pegawai yang merasa dihargai dan bekerja dengan sistem yang fair cenderung memberikan kontribusi optimal bagi instansi.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi ini juga menyesuaikan dengan tren digitalisasi layanan publik yang terus berkembang. Inovasi digital dalam manajemen ASN mendukung transformasi birokrasi yang lebih modern dan responsif terhadap tuntutan zaman. Hal ini sangat relevan mengingat pentingnya layanan publik yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di era digital saat ini (Fakhrudin et al, 2023).

Administrator menjelaskan bahwa penerapan sistem merit di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur yang direkomendasikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode descriptive phenomenological analysis, menemukan bahwa keberhasilan sistem merit sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen penuh dari semua pemangku kepentingan. Chairiah et al. (2020). Selain itu, pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dinilai penting agar implementasi sistem merit bisa optimal.

Yang menyoroti bahwa untuk mencapai "dynamic governance," seluruh pihak harus memahami dan mendukung penerapan sistem merit yang berorientasi pada keadilan, kompetensi, dan kinerja dalam pengelolaan ASN. Namun, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan yang mempengaruhi efektivitas sistem merit, terutama pada aspek prosedur dan pengawasan. Serta menekankan pentingnya kesadaran kolektif, komitmen pimpinan, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa sistem merit dapat berjalan secara efektif, mendorong profesionalisme dan peningkatan kualitas kinerja ASN di Indonesia.

Manajemen talenta dimaknai sebagai proses identifikasi, pengembangan, dan retensi pegawai yang memiliki potensi dan kompetensi tinggi agar bisa mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Pengembangan kompetensi ASN dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran yang berkelanjutan, yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan dan organisasi. Secara keseluruhan,

penerapan SIASN dan aplikasi digital seperti SASIKAP EVO 6.0 membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi pilar utama dalam mengoptimalkan manajemen ASN. Tidak hanya efisiensi waktu dan kualitas pelayanan yang meningkat, namun juga tercipta birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata (Mustamin 2023). Dengan terus mengembangkan dan menyesuaikan teknologi ini, pengelolaan ASN di masa depan dapat berjalan lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa transformasi digital di Kabupaten Sumedang melalui SPBE, I-OPIS Desa, layanan berbasis WhatsApp, dan *Command Center* mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi administrasi, serta partisipasi publik, sehingga mendukung prinsip-prinsip *good governance*. Namun, keberlanjutan model ini masih dihadapkan pada ego sektoral antarinstansi, kesenjangan digital, rendahnya literasi teknologi, dan isu keamanan data. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan digital *Governance* tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh regulasi, kepemimpinan, koordinasi birokrasi, dan keterlibatan masyarakat. Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada pengayaan literatur mengenai praktik tata kelola digital di tingkat lokal, sementara secara praktis memberikan pelajaran bahwa penguatan literasi digital, kolaborasi lintas sektor, dan perlindungan data merupakan prasyarat penting bagi replikasi model serupa di daerah lain di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Aswar, K., Julianto, W., Sumardjo, M., Panjaitan, I., & Nasir, A. (2023). An investigation of the factors affecting citizens' adoption of *e-government* in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 187–197. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.21](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.21)
- Athallah, A. N. (2022). Kualitas Layanan Portal Open Data Banda Aceh (Odba) Dalam Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(1), 38–49. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i1.2698>
- Basri, Y. M., Findayani, T. I., & Zarefar, A. (2021). Implementation of *Good governance* To Improve the. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 123–136.

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chairiah, A. et al. (2020). Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 383–400.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_Poqc
- Fakhrudin, E., Umar, U., & Yuliadi, I. (2023). Efektivitas Penerapan SIASN Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat.
- Hazira, C. G. (2024). Penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam Prosedur Pengajuan Usul Pensiun Pegawai pada Kantor (BKD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Universitas Andalas.
- Ibrahim, A. H. H., Baharuddin, T., & Wance, M. (2023). Bibliometric Analysis of *E-government* and Trust: A Lesson for Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(3), 269–284. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1303>
- Indrayani. (2023). Efektivitas Pelayanan Usul Kenaikan Pangkat Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Siasn) Pada Kantor Regional Iv Bkn Makassar.
- Mustamin. (2023). Manajemen Talenta dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara: Mengoptimalkan Kinerja ASN. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*, 4(2), 166–175.
- Najich Alfayn, M. A. (2022). From *E-government* to *Good governance*: Examining the Impact of Digitalization on Public Service Delivery in Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(2), 19–40. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.14873>
- Pramesti, A. A., & Mardhatillah, Y. (2023). Efektivitas Aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 5(1), 62–86. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i1.2851>
- Purnamasari, P., Binti Amran, N. A., Nu'man, A. H., Frendika, R., Mohamad Nor, M. N., & Ismail, M. S. (2023). The Relationship Between the Components of *E-government* Services Towards Corruption in Malaysia and Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2023, 433–445. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14242>

- Sivarajah, U., Weerakkody, V., Waller, P., Lee, H., Irani, Z., Choi, Y., Morgan, R., & Glikman, Y. (2016). The role of e-participation and open data in evidence-based policy decision making in local government. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 26(1-2), 64-79. <https://doi.org/10.1080/10919392.2015.1125171>
- Sunardi, S., Djazuli, A., Handayani, R. D., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2022). The Role of Human Development in Improving Local Government Performance Through Good Government Governance. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 571-582. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.571-582>
- Supratiwi, W., . I., & Angesti Octorizki, F. (2019). The Role of Good Government Governance on the Influence of *E-government* Implementation Toward Local Government Performance. *KnE Social Sciences*, 3(11), 540. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4033>
- Susanto Machmud, Y., . N., Lukman Irwan, A., . S., & Ilmi Utami Irwan, A. (2023). The Implementation of *Good governance* Principles in the Asset Management of Regional-Owned Enterprises of South Sulawesi Province. *KnE Social Sciences*, 2023, 840-856. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14182>
- Wahyudi, R., Murdiyana, M., & Ikbaluddin, I. (2024). Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi Berbasis Kinerja Organisasi Menggunakan Cobit 2019 dan Balanced Scorecard (Studi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kolaka Timur). *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(2), 313-329. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i2.4756>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).